

Pesan Politik Di Balik Diplomasi Koersif Tiongkok Melalui Latihan Militer Di Selat Taiwan

The Political Message Behind China's Coercive Diplomacy Through Military Exercises In The Taiwan Strait

**Aurell Safa Salsabila¹, Denny Wijaya², Della Nasella³, Tiara Yuri Julianzie⁴,
Vina Aprilia Putri⁵**

Universitas Sriwijaya, Palembang¹²³⁴⁵

Email koresponden: aurelc461@gmail.com

Diterima 11 Desember 2025 | Direvisi 30 April 2026 | Diterbitkan 21 Mei 2026

ABSTRACT

In the last five years, tensions in the Taiwan Strait have increased significantly with the intensification of People's Liberation Army (PLA) military exercises, which serve as an instrument of coercive diplomacy by China. These exercises are not merely a show of force, but are systematically designed to convey limited threats and put pressure on Taiwan, the United States, and regional actors without escalating to open warfare. By combining blockade simulations, median line violations, and joint operations, China is solidifying its sovereignty claims while testing the limits of US tolerance through a deterrence strategy that includes punishment and denial. The impact of these exercises reinforces structural rivalries in the Indo-Pacific, increases the risk of military escalation, and affects regional political and economic stability. This study uses a qualitative approach to analyze the role of military exercises as a multi-level political communication tool that combines strategic messages to domestic and international actors, emphasizing the need for strategic dialogue and regional cooperation to prevent open conflict.

Keywords: *coercive diplomacy, deterrence, Indo-Pacific stability. PLA military exercises, Taiwan strait*

ABSTRAK

Dalam lima tahun terakhir, ketegangan di Selat Taiwan meningkat secara signifikan seiring intensifikasi latihan militer People's Liberation Army (PLA), yang berfungsi sebagai instrumen diplomasi koersif

bagi Tiongkok. Latihan tersebut tidak sekadar unjuk kekuatan, melainkan dirancang secara sistematis untuk menyampaikan ancaman terbatas dan menekan Taiwan, Amerika Serikat, serta aktor regional tanpa mengeskalasi perang terbuka. Dengan menggabungkan simulasi blokade, pelanggaran *median line*, dan operasi gabungan, Tiongkok mengokohkan klaim kedaulatan sekaligus menguji batas toleransi AS melalui strategi *deterrence* yang mencakup *punishment* dan *denial*. Dampak latihan ini memperkuat rivalitas struktural di Indo-Pasifik, meningkatkan risiko eskalasi militer, serta memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi di tingkat regional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengurai peran latihan militer sebagai alat komunikasi politik multi-level yang menggabungkan pesan strategis kepada aktor domestik dan internasional, serta menegaskan perlunya dialog strategis dan kerja sama regional guna mencegah konflik terbuka.

Kata kunci: diplomasi koersif, Selat Taiwan, latihan militer Tiongkok, penangkalan, stabilitas Indo-Pasifik.

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, ketegangan di Selat Taiwan mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Ini ditandai dengan meningkatnya latihan militer People's Liberation Army (PLA) yang terlihat semakin intens, kompleks, dan terkoordinasi. Hal ini menunjukkan perubahan karakter respons Tiongkok terhadap dinamika politik di Taiwan, terutama pasca penguatan identitas pro-status quo dan meningkatnya dukungan internasional bagi Taiwan. Para ahli menilai bahwa latihan militer yang dilakukan bukan hanya sekadar aktivitas rutin, melainkan merupakan bagian dari strategi *coercive diplomacy* yang bertujuan mengubah perilaku pihak lawan tanpa adanya perang secara terbuka. Menurut Wuthnow (2023), PLA kini mengembangkan pola operasi yang meniru skenario invasi, blokade, dan kontrol wilayah udara sebagai bentuk tekanan strategis terhadap Taiwan maupun aktor eksternal seperti Amerika Serikat (AS). Temuan ini diperkuat oleh laporan RAND dan NDU Press yang menunjukkan bahwa latihan-latihan militer tersebut dirancang untuk "mengubah kalkulasi politik Taiwan melalui ancaman yang kredibel" (Wuthnow et al., 2022).

Selat Taiwan memegang peranan yang sangat krusial dalam konteks geopolitik dan keamanan regional Asia Timur. Selain sebagai jalur pelayaran utama yang menghubungkan perairan Asia Timur dengan Samudra Pasifik, selat ini juga merupakan salah satu *chokepoint* paling vital di dunia yang mengalirkan arus perdagangan internasional, terutama barang-barang bernilai tinggi dan strategis. Tidak hanya berfungsi sebagai koridor perdagangan, Selat Taiwan juga memainkan peran sentral dalam rantai pasok global, khususnya dalam distribusi produk-produk teknologi tinggi seperti semikonduktor yang diproduksi oleh Taiwan *Semiconductor*

Manufacturing Company (TSMC), perusahaan yang menjadi tulang punggung industri digital dunia.

Keberlangsungan stabilitas keamanan di wilayah ini memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kelancaran perdagangan dan ekonomi global, karena gangguan di Selat Taiwan dapat menyebabkan efek domino yang luas, memengaruhi pasokan barang elektronik, otomotif, dan berbagai produk manufaktur lainnya yang sangat bergantung pada Taiwan. Yuan (2023) menegaskan bahwa Selat Taiwan tidak sekadar menjadi wilayah geografis biasa, melainkan telah berubah menjadi pusat rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Yuan, 2023). Kedua kekuatan besar tersebut memandang pengaruh dan kendali mereka di Selat Taiwan sebagai tolok ukur kredibilitas dan kapasitas proyeksi kekuatan mereka di kawasan Indo-Pasifik.

Konflik atau ketegangan yang meningkat di wilayah ini berpotensi menimbulkan disrupsi yang meluas, tidak hanya memengaruhi stabilitas kawasan secara langsung, tetapi juga menimbulkan tekanan pada sistem keamanan dan perekonomian global. Eskalasi militer, seperti latihan militer intensif yang dilakukan oleh militer Tiongkok, menimbulkan risiko ketegangan tinggi dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, Selat Taiwan menjadi titik fokus utama bagi strategi regional dan global, di mana dinamika politik dan militer di sana tidak hanya berdampak pada negara-negara di sekitarnya, tetapi juga menjadi penentu besar dalam arsitektur keamanan dan ekonomi dunia modern.

Dalam hal ini, penggunaan kekuatan militer oleh Cina tak hanya sebagai unjuk kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen politik yang tujuannya memengaruhi perilaku dan persepsi pihak lain. Konsep *coercive diplomacy*, sebagaimana dirumuskan oleh Schelling (1966) dan Art (2003), menggambarkan strategi yang menggunakan ancaman atau tindakan terbatas untuk memaksa lawan mengubah perilakunya tanpa harus mengeskalasi hingga perang total. Hal ini sangat relevan dengan pola Latihan PLA yang mengombinasikan unjuk kekuatan, pelanggaran *median line*, dan operasi gabungan sebagai bentuk sinyal strategis. Menurut Fong (2022), tindakan PLA sejak 2020 menunjukkan pola *strategic signaling* yang konsisten dengan karakteristik *coercive diplomacy*, yaitu melalui ancaman yang terukur, penempatan aset militer di dekat target, dan demonstrasi kesiapan tempur untuk memperkuat kredibilitas klaim Tiongkok atas Taiwan (Fong, 2022).

Modernisasi PLA memiliki peran yang cukup besar dalam memperkuat efektivitas latihan militer sebagai instrumen diplomasi koersif. Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok

meningkatkan belanja pertahanannya secara signifikan dan mengembangkan kemampuan *anti-access/area denial* (A2/AD), misil jarak menengah, serta aset angkatan udara modern. Hal ini memungkinkan PLA melakukan latihan yang lebih berani dan agresif di sekitar Selat Taiwan. Sebagaimana dijelaskan oleh Martin & Montgomery (2023), kemampuan baru PLA membuat ancaman Tiongkok terhadap Taiwan menjadi semakin kredibel, sehingga memperkuat fungsi *deterrence*, baik *punishment* maupun *denial*, dalam skenario konflik (McCready, 2003).

Di sisi lain, dimensi politik domestik Tiongkok sangat berperan dalam memotivasi intensifikasi latihan militer di Selat Taiwan. Pemerintahan Xi Jinping menekankan reunifikasi nasional sebagai bagian dari legitimasi politik Partai Komunis Tiongkok. Oleh karena itu, Latihan PLA berfungsi sebagai sinyal internal yang menunjukkan kekuatan negara dan kesiapan Tiongkok dalam mempertahankan klaim kedaulatannya. Studi terbaru oleh Surachman (2023) menyebutkan bahwa retorika nasionalisme domestik telah meningkatkan tekanan pada Beijing untuk menunjukkan respons yang tegas terhadap perkembangan politik di Taiwan, termasuk kemenangan partai-partai pro-otonomi (Surachman, 2023).

Meski banyak literatur yang membahas ketegangan Selat Taiwan, masih belum banyak yang membahas latihan militer PLA pasca-2020 sebagai instrumen diplomasi koersif yang dirancang secara sistematis, bukan hanya sebagai respons insidental, tetapi juga tidak mengulik lebih jauh pesan politik yang ingin disampaikan Tiongkok kepada Taiwan, Amerika Serikat, dan aktor regional lainnya. Sementara dinamika terbaru menunjukkan perubahan mendasar, misalnya terkait frekuensi patroli udara harian, simulasi blokade ekonomi, dan operasi lintas-matra. Mengingat pentingnya Selat Taiwan dalam geopolitik Indo-Pasifik, analisis tentang bagaimana Tiongkok menggunakan latihan militer sebagai alat diplomasi koersif dan penyampaian pesan politik menjadi sangat relevan untuk memahami risiko konflik serta stabilitas kawasan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah strategi diplomasi koersif Tiongkok melalui latihan militer di Selat Taiwan, menggunakan kerangka *deterrence* untuk mengidentifikasi pesan politik yang hendak disampaikan Tiongkok kepada Taiwan, Amerika Serikat, dan aktor regional lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena diplomasi koersif Tiongkok melalui latihan militer di Selat Taiwan.

Metode ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman makna, pola, dan pesan politik yang terkandung dalam tindakan militer Tiongkok.

Menurut Sugiyono (2017), metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif, seperti wawancara, studi literatur, atau dokumen. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengikuti garis metode penelitian ilmu sosial (Sugiyono, 2017). Metode penelitian harus menguraikan metode yang akan digunakan untuk mengatasi masalah, termasuk metode analisis, yang seharusnya memuat detail yang cukup untuk memungkinkan pembaca memahami metode serta menilai validitas temuan.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi sosial tertentu dan umumnya dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Dalam konteks ini, studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti data dari BPS, jurnal, dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan substantif. Tinjauan literatur pada artikel ini menggunakan analisis kualitatif untuk menelaah isu yang dibahas melalui metode berbasis dokumen dan berbasis internet, berdasarkan studi kontemporer yang relevan (Morissan, 2019). Penggunaan berbagai sumber ini memungkinkan penelitian membangun landasan konseptual yang kuat dalam memahami dinamika isu yang dikaji, sekaligus memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki keterkaitan yang logis dengan fenomena aktual di lapangan.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menafsirkan informasi secara mendalam guna melihat bagaimana latihan militer tersebut digunakan sebagai instrumen diplomasi koersif, serta bagaimana pesan politik disampaikan kepada pihak sasaran. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mampu menelusuri konteks, strategi, dan implikasi diplomasi koersif yang dilakukan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola komunikasi politik yang muncul dari latihan militer Tiongkok di Selat Taiwan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa serta intensi politik yang terkandung di balik aksi-aksi militer tersebut, sekaligus memahami bagaimana tindakan itu dimaknai oleh berbagai aktor yang terlibat. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak hanya memberikan penjelasan deskriptif, tetapi juga interpretatif terhadap pesan politik yang menjadi fokus utama artikel ini.

KERANGKA TEORI

Teori Diplomasi Koersif

Diplomasi merupakan sistem komunikasi antarnegara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menangani suatu isu. Diplomasi dapat dipahami sebagai proses dialog dan negosiasi antara negara-negara dalam merespons peluang atau tantangan tertentu (Indrawati & Nugroho, 2019). Pada dasarnya, diplomasi memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi dan konflik antarbangsa merupakan bentuk interaksi yang dipengaruhi oleh tingkat keselarasan atau perbedaan persepsi antara satu aktor dengan aktor lain terkait berbagai aspek hubungan mereka (Rahmadan, 2024). Dalam sistem internasional, penggunaan kekerasan biasanya menjadi pembeda antara situasi damai dan perang. Namun, politik internasional sering berada di wilayah abu-abu, di mana tidak terjadi perdamaian penuh maupun perang terbuka, sehingga ancaman kekerasan tetap ada meskipun tidak selalu diterapkan, dan menjadi faktor penting dalam memahami hubungan serta krisis antarnegara (SPERANDEI, 2006).

Secara umum, diplomasi koersif adalah upaya suatu negara untuk memaksa negara lain agar mengubah sikap atau kebijakannya melalui ancaman, sanksi, atau bahkan penggunaan kekerasan. Diplomasi koersif adalah strategi yang melibatkan ancaman, tekanan, dan paksaan. Strategi ini dijalankan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan tertentu, yang mampu memengaruhi tindakan negara lain. Bentuk tindakan koersif tidak selalu berupa konflik militer, tetapi juga dapat berupa ancaman atau tekanan politik (Anastasia & Yuniasih, 2020). Kekuasaan yang digunakan dalam diplomasi koersif bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan negara yang melakukan tekanan dapat diutamakan di atas kepentingan pihak lain, sejalan dengan prinsip dasar teoritis diplomasi koersif.

Dalam konteks penelitian ini, diplomasi koersif Tiongkok terlihat melalui pemanfaatan latihan militer di Selat Taiwan sebagai bentuk ancaman terbatas yang bertujuan menekan Taiwan agar tidak bergerak menuju kemerdekaan serta mengendalikan ruang gerak diplomasi internasionalnya. Merujuk pada konsep diplomasi koersif yang menekankan tekanan, ancaman, dan pemaksaan tanpa perlu memicu perang terbuka, berbagai manuver PLA seperti pelintasan garis median, simulasi blokade, dan latihan serangan presisi berfungsi sebagai demonstrasi kekuatan yang menunjukkan kesiapan dan kapabilitas militer Tiongkok. Aktivitas ini juga ditujukan kepada Amerika Serikat dan Jepang sebagai sinyal bahwa Beijing memiliki kemampuan untuk menahan intervensi eksternal melalui strategi *anti-access* dan *area denial*. Oleh karena itu, latihan militer tersebut tidak hanya mencerminkan kesiapan militer, tetapi juga

menjadi instrumen komunikasi politik yang mempertegas garis merah Tiongkok, memperkuat posisi tawarnya di kawasan, serta memastikan bahwa dinamika status quo di Selat Taiwan tetap berada dalam kerangka kepentingan strategis Beijing.

Teori Penangkalan (*Deterrence*)

Robert J. Art (2009) mengemukakan pemikirannya mengenai peran kekuatan militer dalam tulisannya yang berjudul *The Use of Force*, yang terdapat dalam buku *International Politics* karya Art dan Robert Jervis. Ia menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara adalah untuk menahan kemungkinan serangan dari negara lain (Art & Jervis, 2007). Bentuk penahanan ini dikenal sebagai teori pencegahan atau penangkalan. Menurut Art, dalam upaya mencegah perang, sebuah negara harus memiliki strategi yang mampu mengurangi niat lawan untuk menyerang dengan memperlihatkan ancaman atau kemampuan yang dimilikinya, sehingga lawan menyadari bahwa kerugian yang akan mereka alami jauh lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh jika mereka tetap melanjutkan serangan .

Dalam teori penangkalan atau *deterrence*, efektivitas upaya penangkalan sangat bergantung pada sejauh mana suatu negara mampu menunjukkan kapabilitas militernya secara meyakinkan kepada pihak yang menjadi sasaran. Kapabilitas tersebut tidak hanya diukur dari kualitas teknologi persenjataan yang dimiliki, tetapi juga mencakup jumlah kekuatan yang dapat dikerahkan, tingkat kesiapan pasukan, serta kemampuan bertahan dan menyerang yang dimiliki oleh aktor penangkal. Suatu negara harus mampu membuktikan bahwa ia memiliki sumber daya militer yang unggul, terlatih, dan siap digunakan kapan pun diperlukan. Keunggulan inilah yang kemudian membentuk persepsi bahwa ancaman yang disampaikan negara tersebut bersifat kredibel dan layak untuk dipertimbangkan. Ketika sebuah negara dapat menampilkan kombinasi kekuatan militer yang besar, kualitas persenjataan yang modern, serta daya juang pasukan yang tinggi, strategi *deterrence* yang digunakannya cenderung lebih efektif dalam mencegah pihak lawan mengambil tindakan yang dianggap merugikan kepentingan negara tersebut (Anastasia & Yuniasih, 2020).

Dalam konteks diplomasi koersif Tiongkok di Selat Taiwan, konsep *deterrence* menjelaskan bagaimana latihan militer dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan politik. Latihan ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan militer Tiongkok, tetapi juga dimaksudkan untuk memengaruhi persepsi pihak lawan, yaitu Taiwan dan aktor internasional

yang terlibat. Dengan menampilkan kekuatan militer modern, jumlah pasukan yang besar, serta kesiapan operasional yang tinggi, Tiongkok menunjukkan bahwa setiap tindakan yang menentanginya berisiko menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh. Strategi ini sesuai dengan prinsip *deterrence*, di mana tujuannya adalah mencegah lawan bertindak melalui kredibilitas ancaman, bukan melalui kekerasan secara langsung. Dengan demikian, latihan militer Tiongkok tidak sekadar untuk latihan, tetapi juga menjadi instrumen politik yang jelas dalam menyampaikan pesan strategis.

PEMBAHASAN

Konteks Strategis Selat Taiwan

Selat Taiwan merupakan salah satu kawasan paling sensitif dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik, terutama karena posisinya sebagai titik temu kepentingan strategis Tiongkok dan Amerika Serikat. Bagi Beijing, Taiwan bukan sekadar isu geopolitik, melainkan bagian dari "*core interest*" yang mencakup legitimasi politik dan narasi nasionalisme domestik. Konteks ini menjelaskan mengapa setiap aktivitas militer, baik latihan, patroli, maupun operasi penegakan hukum maritim, selalu memiliki makna politik yang melampaui aspek teknis pertahanan. Perspektif ini sejalan dengan analisis yang menempatkan Taiwan sebagai ruang yang menentukan kredibilitas kepemimpinan Beijing, terutama dalam proyek politik jangka panjang terkait reunifikasi.

Dari sisi rivalitas kekuatan besar, Selat Taiwan telah menjadi episentrum persaingan strategis antara AS dan Tiongkok. Intensifikasi latihan PLA dan respons AS menciptakan spiral *security dilemma*, di mana "*China's threats and U.S. support have created a security dilemma, in which adversaries build up their respective capabilities in response to each other's actions*" (Qiang, 2020). Dalam konteks ini, tindakan militer tidak dapat dilihat sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari dinamika regional yang semakin mengarah pada kompetisi struktural. Persaingan ini memperkuat pentingnya sinyal militer sebagai instrumen komunikasi politik antaraktor.

Selain itu, perkembangan posisi Taiwan dalam kebijakan luar negeri AS turut memperkuat sensitivitas di kawasan tersebut. Kebijakan *strategic ambiguity* yang dirancang "*to deter China from attacking Taiwan but also to keep Taipei from taking actions that may be deemed provocative*" (Wang, 2025). Menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan Beijing untuk menguji batas toleransi Washington melalui serangkaian latihan militer. Dalam kerangka

teori deterrence, Selat Taiwan menjadi arena di mana ancaman, sinyal, dan kalkulasi biaya dimanipulasi secara strategis oleh kedua pihak.

Pola Latihan Militer Tiongkok di Selat Taiwan

Latihan militer Tiongkok di Selat Taiwan menunjukkan pola yang semakin intens dan beragam sejak 2016, dengan puncak eskalasi pada 2022–2024. Bentuk operasi mencakup simulasi blokade, *crossing median line*, *simulasi serangan presisi*, serta patroli maritim udara berulang. Data terkini menunjukkan bahwa pada Agustus 2022, Tiongkok menutup sejumlah zona laut yang mengganggu jalur pelayaran internasional, sehingga meningkatkan risiko navigasi hingga tiga kali lipat. Operasi seperti ini dipahami bukan sekadar kegiatan pelatihan, melainkan simulasi praoperasional untuk skenario karantina atau blokade jangka panjang sebagaimana diidentifikasi dalam analisis AIS dan laporan China Maritime Report (Tu et al., 2023).

Pola kedua terlihat pada konsistensi pelanggaran median line yang sejak 2020 berubah menjadi praktik harian dan masif pada 2022–2024. Penyeberangan *median line* oleh pesawat PLA dan kapal Haixun 06 di dekat Matsu menunjukkan bahwa Beijing berupaya meniadakan batas *de facto* tersebut. Tiongkok kemudian memperkuat klaim bahwa Selat Taiwan bukan "*international waterway*", melainkan wilayah yang mencakup internal waters hingga EEZ menurut interpretasi maritimnya. Praktik ini mengaburkan batas antara operasi sipil, militer, dan *law enforcement* sebagai bagian dari strategi *grey-zone* (Famularo, 2025). Selain itu, latihan serangan presisi menjadi salah satu komponen paling menonjol, terutama uji rudal yang melintas di atas Taipei pada Agustus 2022. Simulasi ini menunjukkan kemampuan PLA untuk menyerang target strategis Taiwan dengan cepat, sekaligus memberikan sinyal *anti-access/area denial* kepada Amerika Serikat. Latihan ini tidak hanya relevan dalam konteks teknis, tetapi juga memiliki peran simbolik sebagai pesan bahwa Tiongkok mampu melumpuhkan infrastruktur vital Taiwan sejak fase awal konflik.

Pola keempat adalah regularisasi patroli maritim–udara, yang menggabungkan Tiongkok Coast Guard (CCG), patroli MSA, dan unit militer. Operasi seperti "*special joint patrol and inspection*" Haixun 06 pada 2023 menggambarkan upaya Beijing untuk menciptakan *new normal* kehadiran administratif dan penegakan hukum maritim di Selat Taiwan. Pendekatan ini membentuk realitas baru yang perlahan mengikis kontrol Taiwan atas

wilayah perairannya dan memperkuat klaim Tiongkok melalui praktik administratif yang berulang.

Diplomasi Koersif Tiongkok melalui Latihan Militer

Dalam kerangka diplomasi koersif, latihan militer Tiongkok berfungsi sebagai ancaman terbatas (*limited threat*) yang dirancang untuk menekan pihak lawan tanpa memicu konflik terbuka. PLA secara eksplisit mengembangkan kemampuan untuk "*construct combat readiness, deter foreign intervention, and claim sovereignty over Taiwan*" (Ziętek et al., 2025). Dengan mempraktikkan blokade simulatif, serangan presisi, dan operasi gabungan, Beijing mengirimkan sinyal bahwa ia memiliki kapasitas dan kemauan untuk meningkatkan eskalasi apabila status quo berubah, dan ancaman inilah yang menjadi inti dari strategi koersi Tiongkok.

Dimensi kedua dari diplomasi koersif ialah tekanan psikologis terhadap Taiwan. Pendekatan *dual-track* yang menggabungkan *engagement* dan tindakan keras, termasuk "*punitive measures against the acute 'Taiwan independence' firebrands*", menunjukkan bahwa segala bentuk sinyal politik dari Taipei dianggap sebagai ancaman (Kala, 2025). Melintasi *median line*, penetrasi ADIZ, dan patroli penegakan hukum di sekitar Matsu menciptakan persepsi kerentanan publik Taiwan terhadap potensi konflik. Efek psikologis tersebut bertujuan untuk mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dan otoritas maritim Taiwan dalam menjaga kedaulatan *de facto*.

Dimensi ketiga adalah upaya untuk membatasi ruang diplomasi internasional Taiwan. Latihan berskala besar, termasuk blokade simulatif 2022, digunakan untuk mengirim sinyal bahwa negara-negara yang meningkatkan hubungan resmi dengan Taipei akan menghadapi risiko eskalasi. Pada saat yang sama, kebijakan *strategic ambiguity* AS diuji oleh Beijing, karena Tiongkok ingin mempersempit ruang manuver Washington dan menciptakan ketidakpastian apakah AS akan merespons secara militer. Latihan PLA berfungsi sebagai "*calculated coercion*" untuk menekan aktor domestik di Taiwan maupun aktor eksternal.

Keempat, diplomasi koersif Tiongkok bekerja dalam ranah *legal warfare* dan *grey-zone warfare*. Melalui patroli CCG/MSA, inspeksi kapal lintas selat, dan klaim bahwa Selat Taiwan bukan perairan internasional, Beijing berupaya membangun praktik administratif berulang yang dapat dikonversi menjadi bukti klaim yurisdiksi di masa depan. Strategi ini memperlihatkan bahwa koersi Tiongkok tidak hanya bekerja melalui ancaman militer secara langsung, tetapi juga melalui manipulasi hukum dan pembentukan realitas baru yang pada akhirnya diterima sebagai *new normal* oleh para aktor regional.

Implementasi Penangkalan (*Deterrence*)

Dalam implementasinya, terdapat beberapa pembagian dengan menggunakan *deterrence*, yaitu (a) *deterrence* melalui *punishment*, yaitu Tiongkok yang menerapkan *deterrence by punishment* dengan mengirimkan sinyal bahwa setiap langkah Taiwan menuju kemerdekaan akan dibalas secara militer. Pendekatan ini tercermin dari latihan simulasi serangan presisi terhadap target strategis, pelintasan agresif garis median, hingga penggelaran rudal balistik yang mampu menjangkau instalasi vital di Taiwan. Melalui demonstrasi kekuatan ini, Beijing berusaha menanamkan persepsi bahwa Taiwan harus membayar mahal (*high cost calculation*) sehingga Taiwan mengurungkan niat melakukan langkah separatis. *Punishment* di sini berfungsi sebagai alat tekanan psikologis dan militer yang bertujuan membentuk perilaku politik Taiwan sesuai dengan preferensi Beijing. (b) *Deterrence* melalui *denial*, Selain ancaman pembalasan, Tiongkok juga menggunakan *deterrence by denial* dengan memperkuat kemampuan A2/AD untuk menggagalkan potensi intervensi Amerika Serikat dan Jepang. Penggelaran rudal anti-kapal jarak jauh, pertahanan udara berlapis, serta latihan blokade yang mensimulasikan isolasi Taiwan menunjukkan upaya Tiongkok untuk menciptakan kondisi yang membuat operasi militer eksternal sulit dilakukan dan tidak menjamin keberhasilan. Dengan menutup akses dan mempersulit pergerakan militer musuh, Beijing berharap AS menghitung ulang risiko eskalasi.

Pendekatan *denial* ini memperlihatkan bagaimana Tiongkok berupaya mencegah keberhasilan intervensi sebelum konflik dimulai. (c) Integrasi *Punishment–Denial* sebagai strategi menyeluruh terjadi ketika kedua mekanisme tersebut bekerja secara komplementer sebagai bagian dari strategi pertahanan dan komunikasi politik Tiongkok. Sementara *punishment* ditujukan terutama kepada Taiwan sebagai ancaman langsung terhadap tindakan separatis, *denial* diproyeksikan kepada AS dan Jepang untuk menghambat potensi campur tangan pihak luar. Integrasi ini menciptakan model *deterrence* berlapis yang memperkuat posisi negosiasi Beijing, sekaligus menjadikan latihan militer PLA bukan sekadar kegiatan operasional, melainkan instrumen utama diplomasi koersif dan *signaling* strategis di Selat Taiwan.

Pesan Politik kepada Aktor Lintas Level

Latihan militer PLA di Selat Taiwan tidak hanya memiliki fungsi operasional, tetapi juga mengandung pesan politik yang disusun secara strategis dan diarahkan kepada berbagai

aktor pada tingkat domestik, regional, hingga internasional. Bagi Taiwan, latihan ini merupakan sinyal paling eksplisit bahwa Beijing memandang isu kemerdekaan sebagai "garis merah absolut" yang tidak dapat dinegosiasikan. Peningkatan frekuensi patroli udara, pelintasan *median line*, simulasi serangan presisi terhadap target strategis, serta latihan blokade yang secara langsung mensimulasikan isolasi Taiwan, semuanya ditujukan untuk menciptakan tekanan psikologis dan politik agar pemerintah Taiwan tetap berada dalam koridor *status quo*. Pesan ini diperkuat dengan narasi resmi Tiongkok yang menekankan bahwa setiap langkah separatis akan berdampak secara militer, sehingga pemerintah Taiwan dihitung-hitung agar keputusan politik mereka tidak melampaui batas toleransi Beijing.

Untuk Amerika Serikat dan Jepang, latihan militer PLA berfungsi sebagai *strategic warning* bahwa Tiongkok semakin siap menghadapi potensi intervensi eksternal, terutama melalui penguatan kapabilitas A2/AD yang membuat operasi militer eksternal tidak lagi mudah dilakukan. Latihan-latihan tersebut mengirimkan pesan bahwa setiap upaya Washington untuk mempertahankan Taiwan sebagai mitra strategis berarti berhadapan dengan risiko eskalasi militer yang nyata, termasuk kemungkinan serangan balasan terhadap pangkalan AS di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Tiongkok tidak hanya memamerkan kekuatan, tetapi juga melakukan *signaling* untuk mengubah kalkulasi strategis AS dan Jepang bahwa campur tangan militer tidak lagi dapat dilakukan tanpa biaya tinggi, sehingga komitmen keamanan mereka terhadap Taiwan diuji secara langsung.

Sementara itu, bagi komunitas internasional, latihan PLA memiliki dimensi diplomasi simbolik. Tiongkok berusaha menormalisasi pengerahan militer di sekitar Taiwan dengan menampilkan narasi bahwa latihan tersebut merupakan bagian yang sah dari aktivitas di wilayah yurisdiksi mereka, sekaligus sebagai respons terhadap tindakan "provokatif" yang dianggap melanggar prinsip "*One China*". Dengan menjadikan aktivitas militer sebagai rutinitas, Tiongkok berharap persepsi global bergeser: dari melihat PLA sebagai eskalator ketegangan, menjadi melihat latihan tersebut sebagai bagian dari "kondisi baru" yang tidak harus menimbulkan alarm internasional. Strategi ini juga bertujuan untuk melemahkan dukungan diplomatik bagi Taiwan, terutama dari negara-negara kecil yang bergantung pada hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Pada saat yang sama, latihan militer ini memiliki audiens internal yang sangat penting, yaitu publik domestik Tiongkok.

Pemerintah memanfaatkan momen latihan besar untuk memperkuat legitimasi politik dengan menunjukkan bahwa negara memiliki tekad dan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan serta mewujudkan "reunifikasi nasional". Melalui liputan media yang intens dan

narasi nasionalistik, latihan PLA menjadi alat untuk memupuk kebanggaan nasional, mengonsolidasikan dukungan terhadap Partai Komunis, dan meredam kritik domestik dengan menampilkan citra pemerintah yang kuat dan tegas. Dengan demikian, latihan militer tidak hanya merupakan bagian dari strategi militer, tetapi juga instrumen komunikasi politik multi-level yang dirancang secara cermat untuk mempengaruhi perhitungan strategis Taiwan, melemahkan intervensi AS dan Jepang, membentuk opini publik global, dan memperkuat konsolidasi politik di dalam negeri.

Implikasi Strategis Latihan PLA terhadap Stabilitas Kawasan

Latihan militer intensif yang dilakukan PLA di sekitar Selat Taiwan membawa implikasi strategis yang signifikan bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik karena memperkuat dinamika keamanan yang semakin kompetitif dan berpotensi memicu mispersepsi antarnegara. Latihan yang mensimulasikan blokade, serangan presisi, dan operasi *joint firepower* bukan hanya ditujukan kepada Taiwan, tetapi juga merupakan sinyal strategis kepada Amerika Serikat dan sekutu regionalnya bahwa Tiongkok kini memiliki kapabilitas untuk mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Peningkatan frekuensi dan kompleksitas latihan PLA mendorong negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina untuk memperdalam kerja sama pertahanan dengan AS, termasuk modernisasi aset militer, integrasi intelijen, serta penguatan postur pasukan AS di First Island Chain. Fenomena ini mencerminkan dinamika *security dilemma*, di mana tindakan defensif satu negara justru direspons secara ofensif oleh negara lain (Wivel, 2011).

Dalam konteks ini, manuver PLA memperlihatkan upaya Tiongkok untuk menegaskan dominasi strategis di sekeliling Taiwan sekaligus memperluas jangkauan A2/AD guna membuat intervensi eksternal semakin berisiko (Acton, 2018). Selain memperkeruh hubungan Tiongkok-AS, latihan ini memperbesar kemungkinan terjadinya insiden militer yang tidak disengaja (*accidental escalation*), terutama mengingat semakin seringnya interaksi antara aset militer kedua negara di udara maupun di laut. Hal ini berbahaya karena menempatkan kawasan dalam situasi di mana krisis tak terduga dapat dengan cepat berubah menjadi konflik terbuka apabila salah satu pihak menilai tindakan pihak lain sebagai ancaman langsung (Montgomery, 2014). Di sisi ekonomi-politik, manuver PLA juga berdampak pada stabilitas jalur perdagangan dan rantai pasok global, karena Selat Taiwan merupakan salah satu *chokepoint* penting yang mengalirkan lebih dari sepertiga perdagangan di Asia Timur. Dengan demikian, latihan PLA

tidak hanya berfungsi sebagai demonstrasi kekuatan, tetapi juga menciptakan tekanan multidimensi terhadap arsitektur keamanan regional, memicu respons strategis baru dari Amerika Serikat dan sekutunya, serta memperlemah prediktabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa latihan militer yang dilakukan oleh People's Liberation Army (PLA) di Selat Taiwan sejak 2020 bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian integral dari strategi diplomasi koersif yang dirancang untuk memengaruhi perilaku dan kalkulasi politik Taiwan, Amerika Serikat, dan aktor regional lainnya tanpa memicu perang terbuka. PLA menggabungkan berbagai pola operasi seperti simulasi blokade, pelanggaran *median line*, serangan presisi, dan patroli udara-maritim yang intens dan terkoordinasi, yang secara sistematis menyampaikan ancaman terbatas serta menampilkan kesiapan tempur yang kredibel. Hal ini sesuai dengan konsep diplomasi koersif dan teori *deterrence* yang menekankan perlunya ancaman yang dapat dipercaya untuk memengaruhi lawan agar menghindari tindakan yang dianggap provokatif.

Dari segi strategi, latihan militer ini tidak hanya berfungsi sebagai unjuk kekuatan, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi politik yang menunjukan garis merah Beijing terkait kemerdekaan Taiwan, sekaligus menekan ruang diplomasi internasional Taiwan dengan cara memperkuat klaim kedaulatan melalui praktik administratif berulang dan kehadiran militer yang semakin menyatu dengan operasi penegakan hukum. Selain itu, modernisasi dan peningkatan kapabilitas PLA dalam hal A2/AD serta serangan presisi memungkinkan Tiongkok memperkuat strategi *deterrence* berlapis, yakni *deterrence by punishment* terhadap Taiwan dan *deterrence by denial* terhadap kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat dan sekutu regional. Ini menjadikan latihan militer sebagai alat untuk menyampaikan pesan strategis yang kompleks dan multifungsi, tidak hanya kepada pihak yang menjadi target langsung, tetapi juga kepada audiens global dan domestik di Tiongkok.

Implikasi strategis dari eskalasi latihan militer PLA di Selat Taiwan ini sangat signifikan bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Situasi ini mendorong peningkatan dinamika *security dilemma* antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan sekutu regional, memperbesar risiko eskalasi militer yang tidak disengaja, serta menimbulkan ketidakpastian geopolitik yang melemahkan prediktabilitas keamanan di kawasan. Lebih jauh, adanya risiko gangguan terhadap jalur pelayaran dan rantai pasok global yang melintasi Selat Taiwan membuat

ketegangan ini tidak hanya menjadi masalah regional, tetapi juga berdampak ekonomi-politik global. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan dan pengamat internasional untuk memahami bahwa latihan militer PLA di Selat Taiwan merupakan strategi diplomasi koersif yang harus dilihat sebagai bagian dari persaingan strategis yang lebih luas, yang memerlukan pendekatan diplomatik dan keamanan yang hati-hati guna mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.

Penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan dialog strategis yang lebih intensif antara aktor-aktor utama di kawasan, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Taiwan, untuk mengurangi risiko mispersepsi serta memperkuat mekanisme komunikasi guna meredakan ketegangan. Selain itu, dengan memahami karakter diplomasi koersif Tiongkok yang menggunakan latihan militer sebagai instrumen politik, negara-negara di Indo-Pasifik hendaknya mengembangkan strategi penanggulangan yang mencakup aspek militer, diplomasi, dan kerja sama regional agar stabilitas kawasan tetap terjaga tanpa harus menghadapi risiko konfrontasi langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Acton, J. M. (2018). Escalation through Entanglement: How the Vulnerability of Command-and-Control Systems Raises the Risks of an Inadvertent Nuclear War. *International Security*, 43(1), 56–99. https://doi.org/10.1162/isec_a_00320
- Anastasia, N. U., & Yuniasih, T. (2020). Strategi Nuclear Deterrence Korea Utara Terkait Perkembangan Militer Di Kawasan Asia Timur Pada Tahun 2018-2020. *Balcony (Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy)*, 4(2).
- Art, R. J., & Jervis, R. (2007). *International Politics : Enduring Concepts and Contemporary Issues* (8th ed.). Pearson/Longman.
- Famularo, J. (2025). *China Maritime Report #48: Great Inspectations: PRC Maritime Law Enforcement Operations in the Taiwan Strait*.
- Fong, A. (2022). *Obama's vs. Trump's Taiwan Policies: Understanding China's Military Incursions in the Taiwan Strait*. Harvard University.

- Indrawati, I., & Nugroho, A. Y. (2019). Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim [The Implementation of Indonesian Foreign Policy through Maritime Diplomacy]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 10(20), 14–26. <https://doi.org/10.19166/verity.v10i20.1462>
- Kala, N. (2025). Investigating China's Maritime Military Exercises and Expansion: Challenges to Taiwan. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 7(3).
- McCready, D. (2003). *Crisis Deterrence In The Taiwan Strait*.
- Montgomery, E. B. (2014). Contested Primacy in the Western Pacific: China's Rise and the Future of U.S. Power Projection. *International Security*, 38(4), 115–149. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00160
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif (1st)*. Prenada Media.
- Qiang, X. (2020). Selective Engagement: Mainland China's Dual-Track Taiwan Policy. *Journal of Contemporary China*, 29(124), 535–552. <https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1677363>
- Rahmadan, Y. (2024). The Gibraltar Issue: A Framing and Discourse Analysis of Spain During the Brexit Negotiation. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v4i1.3164>
- SPERANDEI, M. (2006). Bridging Deterrence and Compellence: An Alternative Approach to the Study of Coercive Diplomacy. *International Studies Review*, 8(2), 253–280. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2006.00573.x>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Surachman, R. (2023). Keseimbangan Kekuatan Taiwan-Tiongkok: Dinamika dan Tantangan. *ResearchGate*.
- Tu, M., Chen, S.-T., Huang, Y.-K., Yang, M.-F., & Huang, K.-C. (2023). *Assessment of the navigation safety in the Taiwan Strait during China's naval blockade*.

- Wang, T. Y. (2025). Strategic Ambiguity or Strategic Clarity: China's Rise and US Policy Towards the Taiwan Issue. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 12(2), 221–240. <https://doi.org/10.1177/23477970251335139>
- Wivel, A. (2011). *Security dilemma* (B. Badie, D. B. Schlosser, & L. Morlino, Eds.). Sage.
- Wuthnow, J., Grossman, D., Saunders, Philip. C., Scobell, A., & Yang, A. N. D. (2022). *Crossing the strait: China's military prepares for war with taiwan*.
- Yuan, J. (2023). The United States and stability in the Taiwan Strait. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 79(2), 80–86. <https://doi.org/10.1080/00963402.2023.2178176>
- Ziętek, A., Larus, E. F., & Tatarczak, A. (2025). The Taiwan Game. Navigating U.S.-China Tensions from Game Theory Perspective. *Stosunki Międzynarodowe – International Relations*, 5, 14. <https://doi.org/10.12688/stomiedintrelat.17927.2>